



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.55, 2016

KEMENKUMHAM. Pelaksanaan. Tunjangan
Kinerja. Pemberian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai

di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
5. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

Pasal 2

Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

- a. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP; dan
- b. kehadiran menurut hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan

struktural di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan Kelas Jabatan dan hasil penilaian SKP.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditentukan sebagai berikut:
 - a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jum'at;
 - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Jum'at.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. penugasan atasan langsung;
 - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. hari dan Jam Kerja tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar atau pendidikan kedinasan.
- (3) Penentuan hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja sampai dengan pukul 8.00 waktu setempat atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal Jam Kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

Pasal 9

Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, jika:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja, tanpa persetujuan atau izin dari atasan langsung atau atasan dari atasan langsung.

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan Jam Kerja pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual, jika:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;

- c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
- d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

BAB IV
PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI

Pasal 11

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jabatan fungsional umum sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas Belajar yang melebihi waktu yang diberikan berdasarkan izin Tugas Belajar dari pimpinan unit kerja, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) pada tahun pertama;
 - b. 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun kedua; dan
 - c. 10 % (sepuluh per seratus), jika lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.

Pasal 15

Pegawai dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja sebesar 5% (lima per seratus) per hari;
- b. tidak mengikuti pendidikan kedinasan atau Tugas Belajar sebesar 5% (lima per seratus) per hari; dan
- c. tidak berada di tempat tugas sebesar 1% (satu per seratus) per hari.

Pasal 16

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk setiap kali terlambat; dan
- d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja,

dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat.

Pasal 17

Pegawai yang tidak memenuhi penggantian Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai potongan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

Pasal 18

Bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan
- d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus).

- b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 1. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 2. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 3. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 20

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Pasal 21

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga dan keempat, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 1. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 2. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 3. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 22

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari; dan
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam waktu paling lama:
- a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 23

- (1) Bagi Pegawai yang memiliki izin dan alasan yang sah, potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 18, hanya dikenai setengah dari besaran potongan Tunjangan Kinerja yang seharusnya dikenakan
- (2) Izin atau alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengajukan

surat permohonan izin atau surat keterangan yang telah disetujui oleh atasan langsung.

- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan izin.
- (4) Format surat permohonan izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang dilakukan antara tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan berjalan sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berikutnya.
- (3) Pencatatan nilai capaian SKP, kehadiran, dan pelaksanaan cuti Pegawai dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah pejabat struktural eselon V atau PNS

yang pangkatnya paling rendah setingkat pejabat struktural eselon V.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) membuat laporan rincian pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja Pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pencatatan capaian SKP, kehadiran, serta pelaksanaan cuti Pegawai.
 - (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja dalam waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1362) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 427), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	27.577.500
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15	15.997.500
3	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	12	8.210.250
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
5	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
6	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
7	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12	8.210.250
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9	4.522.500
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9	4.522.500
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9	4.522.500
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9	4.522.500
13	KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN I	9	4.522.500
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN,	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ANALISIS, DAN PELAPORAN II		
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN III	9	4.522.500
17	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN IV	9	4.522.500
18	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	12	8.210.250
19	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN I	9	4.522.500
20	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN II	9	4.522.500
21	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN III	9	4.522.500
22	KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA	12	8.210.250
23	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI SARANA KERJA	9	4.522.500
24	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM, PROSEDUR, DAN METODA	9	4.522.500
25	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS TATA LAKSANA	9	4.522.500
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
27	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15	15.997.500
28	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
29	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PENEMPATAN PEGAWAI	9	4.522.500
30	KEPALA SUBBAGIAN SELEKSI PEGAWAI	9	4.522.500
31	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
32	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN ARSIP PEGAWAI	9	4.522.500
33	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12	8.210.250
34	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER	9	4.522.500
35	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	9	4.522.500
36	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL I	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
37	KEPALA BAGIAN SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL II	9	4.522.500
38	KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI	12	8.210.250
39	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	9	4.522.500
40	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL I	9	4.522.500
41	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL II	9	4.522.500
42	KEPALA SUBBAGIAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
43	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI	12	8.210.250
44	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI I	9	4.522.500
45	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI II	9	4.522.500
46	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI III	9	4.522.500
47	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI IV	9	4.522.500
48	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	12	8.210.250
49	KEPALA SUBBAGIAN PERIZINAN, KONSULTASI, DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI	9	4.522.500
50	KEPALA SUBBAGIAN JAMINAN SOSIAL DAN PEMBEKALAN PURNA BAKTI	9	4.522.500
51	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
52	KEPALA BIRO KEUANGAN	15	15.997.500
53	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	12	8.210.250
54	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I	9	4.522.500
55	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II	9	4.522.500
56	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN III	9	4.522.500
57	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
58	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN	12	8.210.250
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN I	9	4.522.500
60	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN II	9	4.522.500
61	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN III	9	4.522.500
62	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
63	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN	12	8.210.250
64	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN I	9	4.522.500
65	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II	9	4.522.500
66	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN III	9	4.522.500
67	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN IV	9	4.522.500
68	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
69	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	9	4.522.500
70	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	9	4.522.500
71	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN III	9	4.522.500
72	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN IV	9	4.522.500
73	KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	15	15.997.500
74	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA DAN TATA USAHA BIRO	12	8.210.250
75	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA I	9	4.522.500
76	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA II	9	4.522.500
77	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA III	9	4.522.500
78	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
79	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA	12	8.210.250
80	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	LAYANAN PENGADAAN		
81	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN	9	4.522.500
82	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	4.522.500
83	KEPALA BAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA	12	8.210.250
84	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA I	9	4.522.500
85	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA II	9	4.522.500
86	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA III	9	4.522.500
87	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12	8.210.250
88	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA I	9	4.522.500
89	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA II	9	4.522.500
90	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA III	9	4.522.500
91	KEPALA BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	12	8.210.250
92	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I	9	4.522.500
93	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA II	9	4.522.500
94	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA III	9	4.522.500
95	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJASAMA	15	15.997.500
96	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	8.210.250
97	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA PEMERINTAH	9	4.522.500
98	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	LEMBAGA NON PEMERINTAH		
99	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
100	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	8.210.250
101	KEPALA SUBBAGIAN PELIPUTAN DAN PENYAJIAN BERITA	9	4.522.500
102	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA	9	4.522.500
103	KEPALA SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
104	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	8.210.250
105	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL	9	4.522.500
106	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA REGIONAL	9	4.522.500
107	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA MULTILATERAL	9	4.522.500
108	KEPALA BAGIAN LAYANAN ADVOKASI HUKUM	12	8.210.250
109	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM KEMENTERIAN	9	4.522.500
110	KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM KEMENTERIAN	9	4.522.500
111	KEPALA BIRO UMUM	15	15.997.500
112	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN	12	8.210.250
113	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	4.522.500
114	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	9	4.522.500
115	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF	9	4.522.500
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
117	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12	8.210.250
118	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	9	4.522.500
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9	4.522.500
120	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
121	KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL DAN LAYANAN KESEHATAN	12	8.210.250
122	KEPALA SUBBAGIAN BINA SIKAP MENTAL PEGAWAI	9	4.522.500
123	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	9	4.522.500
124	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	12	8.210.250
125	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9	4.522.500
126	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
127	KEPALA SUBBAGIAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI	9	4.522.500
128	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL	9	4.522.500
129	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12	8.210.250
130	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9	4.522.500
131	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9	4.522.500
132	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9	4.522.500
133	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9	4.522.500
134	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15	15.997.500
135	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	12	8.210.250
136	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
137	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
138	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
139	KEPALA BIDANG STANDARDISASI DAN KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI	12	8.210.250
140	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
141	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
142	KEPALA SUBBIDANG KERJA SAMA DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
143	KEPALA BIDANG DATA DAN PENGAMANAN JARINGAN	12	8.210.250
144	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
145	KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DATA DAN JARINGAN	9	4.522.500
146	KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
147	INSPEKTUR JENDERAL	17	27.577.500
148	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15	15.997.500
149	KEPALA BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN	12	8.210.250
150	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
151	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
152	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
153	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
154	KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN	12	8.210.250
155	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
156	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN I	9	4.522.500
157	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN II	9	4.522.500
158	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADUAN	9	4.522.500
159	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
160	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
161	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
162	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
163	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
164	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
165	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP	9	4.522.500
166	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
167	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
168	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
169	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
170	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
171	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN	9	4.522.500
172	INSPEKTUR WILAYAH I	15	15.997.500
173	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH I	9	4.522.500
174	INSPEKTUR WILAYAH II	15	15.997.500
175	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH II	9	4.522.500
176	INSPEKTUR WILAYAH III	15	15.997.500
177	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH III	9	4.522.500
178	INSPEKTUR WILAYAH IV	15	15.997.500
179	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH IV	9	4.522.500
180	INSPEKTUR WILAYAH V	15	15.997.500
181	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH V	9	4.522.500
182	INSPEKTUR WILAYAH VI	15	15.997.500
183	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH VI	9	4.522.500
184	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17	27.577.500
185	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15	15.997.500
186	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
187	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH I	9	4.522.500
188	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH II	9	4.522.500
189	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN		
190	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
191	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
192	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
193	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	4.522.500
194	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
195	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
196	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
197	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN	9	4.522.500
198	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	4.522.500
199	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
200	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN	12	8.210.250
201	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
202	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
203	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9	4.522.500
204	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM	12	8.210.250
205	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
206	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEPUSTAKAAN	9	4.522.500
207	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
208	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
209	DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
210	KEPALA SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	12	8.210.250
211	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH I	9	4.522.500
212	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERJALANAN WILAYAH II		
213	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH III	9	4.522.500
214	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN ANALISIS DOKUMEN PERJALANAN	12	8.210.250
215	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN DAN STANDARDISASI DOKUMEN PERJALANAN	9	4.522.500
216	KEPALA SEKSI PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN PERJALANAN	9	4.522.500
217	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DOKUMEN PERJALANAN	9	4.522.500
218	KEPALA SUBDIREKTORAT VISA	12	8.210.250
219	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN, DAN STANDARDISASI VISA	9	4.522.500
220	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN	9	4.522.500
221	KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS	9	4.522.500
222	KEPALA SEKSI VISA NEGARA TERTENTU	9	4.522.500
223	KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	12	8.210.250
224	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT	9	4.522.500
225	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA	9	4.522.500
226	KEPALA SEKSI POS LINTAS BATAS DAN TEMPAT LAIN	9	4.522.500
227	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
228	DIREKTUR IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
229	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL	12	8.210.250
300	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL NEGARA TERTENTU	9	4.522.500
301	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS	9	4.522.500
302	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP	9	4.522.500
303	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DARURAT DAN KEADAAN TERPAKSA	9	4.522.500
304	KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS IZIN TINGGAL	12	8.210.250
305	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS	9	4.522.500
306	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	TETAP		
307	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
308	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN	12	8.210.250
309	KEPALA SEKSI PENELAAHAN STATUS	9	4.522.500
310	KEPALA SEKSI SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
311	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
312	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
313	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYELIDIKAN DAN OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
314	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
315	KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WLAYAH I	9	4.522.500
316	KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WILAYAH II	9	4.522.500
317	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
318	KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DAN INSTALASI VITAL	9	4.522.500
319	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL, MATERIAL, DAN DOKUMEN	9	4.522.500
320	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN	9	4.522.500
321	KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
322	KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATAN INTELIJEN	9	4.522.500
323	KEPALA SEKSI PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN	9	4.522.500
324	KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
325	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
326	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGA INTELIJEN	9	4.522.500
327	KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NON LEMBAGA	9	4.522.500
328	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
329	DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN	15	15.997.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEIMIGRASIAN		
330	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
331	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH I	9	4.522.500
332	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH II	9	4.522.500
333	KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL	9	4.522.500
334	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
335	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH I	9	4.522.500
336	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH II	9	4.522.500
337	KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	4.522.500
338	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN	12	8.210.250
339	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	4.522.500
340	KEPALA SEKSI PENANGKALAN	9	4.522.500
341	KEPALA SUBDIREKTORAT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI	12	8.210.250
342	KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI	9	4.522.500
343	KEPALA SEKSI DEPORTASI	9	4.522.500
344	KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL	9	4.522.500
345	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
346	DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
347	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA	12	8.210.250
348	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA PEMERINTAH	9	4.522.500
349	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH	9	4.522.500
350	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL	12	8.210.250
351	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	4.522.500
352	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA		
353	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN ANTARNEGARA	12	8.210.250
354	KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN BILATERAL	9	4.522.500
355	KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN MULTILATERAL	9	4.522.500
356	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN PERWAKILAN ASING DAN BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA	12	8.210.250
357	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN PERWAKILAN NEGARA ASING	9	4.522.500
358	KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I	9	4.522.500
359	KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH II	9	4.522.500
360	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
361	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
362	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	12	8.210.250
363	KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
364	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
365	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
366	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN	12	8.210.250
367	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH I	9	4.522.500
368	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH II	9	4.522.500
369	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH III	9	4.522.500
370	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
371	KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
372	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
373	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN	12	8.210.250
374	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN PERLINTASAN	9	4.522.500
375	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN IZIN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
376	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN DOKUMEN PERJALANAN	9	4.522.500
377	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
378	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17	27.577.500
379	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15	15.997.500
380	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
381	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
382	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
383	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
384	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
385	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
386	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	4.522.500
387	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
388	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
389	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
390	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
391	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
392	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	8.210.250
393	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
394	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
395	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
396	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	12	8.210.250
397	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN STRATEGI KOMUNIKASI	9	4.522.500
398	KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI	9	4.522.500
399	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
400	DIREKTUR KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15	15.997.500
401	KEPALA SUBDIREKTORAT INTELIJEN	12	8.210.250
402	KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH I	9	4.522.500
403	KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH II	9	4.522.500
404	KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH III	9	4.522.500
405	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN	12	8.210.250
406	KEPALA SEKSI STRATEGI PENCEGAHAN	9	4.522.500
407	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN KEAMANAN	9	4.522.500
408	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENANGGULANGAN	12	8.210.250
409	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	4.522.500
410	KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN	9	4.522.500
411	KEPALA SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN EVALUASI	12	8.210.250
412	KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN KODE ETIK	9	4.522.500
413	KEPALA SEKSI LAYANAN PENGADUAN	9	4.522.500
414	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
415	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
416	DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI	15	15.997.500
417	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN DAN EVALUASI	12	8.210.250
418	KEPALA SEKSI PERAWATAN DASAR DAN KELOMPOK RENTAN	9	4.522.500
419	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN	9	4.522.500
420	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
421	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN LANJUTAN	12	8.210.250
422	KEPALA SEKSI PERAWATAN RUJUKAN	9	4.522.500
423	KEPALA SEKSI PERAWATAN MENTAL DAN PALIATIF	9	4.522.500
424	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS DAN REHABILITASI	12	8.210.250
425	KEPALA SEKSI PERAWATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR	9	4.522.500
426	KEPALA SEKSI PERAWATAN HIV/AIDS	9	4.522.500
427	KEPALA SEKSI REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKITIF	9	4.522.500
428	KEPALA SUBDIREKTORAT KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12	8.210.250
429	KEPALA SEKSI KEBUTUHAN DASAR	9	4.522.500
430	KEPALA SEKSI GIZI DAN MAKANAN	9	4.522.500
431	KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9	4.522.500
432	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
433	DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	15	15.997.500
434	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PELAYANAN TAHANAN DAN EVALUASI	12	8.210.250
435	KEPALA SEKSI REGISTRASI TAHANAN	9	4.522.500
436	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI TAHANAN	9	4.522.500
437	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
438	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN	12	8.210.250
439	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM	9	4.522.500
440	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILAN DAN KEPRIBADIAN	9	4.522.500
441	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	8.210.250
442	KEPALA SEKSI REGISTRASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
443	KEPALA SEKSI PENILAIAN DAN KLASIFIKASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	4.522.500
444	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	8.210.250
445	KEPALA SEKSI KLARIFIKASI DAN MUTASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	4.522.500
446	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	4.522.500
447	KEPALA SEKSI PENGAMANAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	4.522.500
448	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
449	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA	15	15.997.500
450	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	8.210.250
451	KEPALA SEKSI PERANCANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
452	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
453	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12	8.210.250
454	KEPALA SEKSI ANALISIS DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
455	KEPALA SEKSI PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
456	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN EVALUASI	12	8.210.250
457	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI	9	4.522.500
458	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI	9	4.522.500
459	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
460	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	8.210.250
461	KEPALA SEKSI PENGAMANAN TEKNOLOGI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	INFORMASI		
462	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
463	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
464	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15	15.997.500
465	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN PENDAMPINGAN	12	8.210.250
466	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN	9	4.522.500
467	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI	9	4.522.500
468	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN DIVERSI	9	4.522.500
469	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN	12	8.210.250
470	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEPRIBADIAN	9	4.522.500
471	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMANDIRIAN	9	4.522.500
472	KEPALA SEKSI BIMBINGAN LANJUTAN	9	4.522.500
473	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KLIEN	9	4.522.500
474	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN EVALUASI	12	8.210.250
475	KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK	9	4.522.500
476	KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN	9	4.522.500
477	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
478	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN ANAK	12	8.210.250
479	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN	9	4.522.500
480	KEPALA SEKSI PELAYANAN ANAK	9	4.522.500
481	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK	9	4.522.500
482	KEPALA SEKSI INTEGRASI ANAK	9	4.522.500
483	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
484	DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI	15	15.997.500
485	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PEMBINAAN DAN EVALUASI	12	8.210.250
486	KEPALA SEKSI REGISTRASI NARAPIDANA	9	4.522.500
487	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KLASIFIKASI NARAPIDANA		
488	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
489	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KEPRIBADIAN	12	8.210.250
490	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN KESADARAN BERNEGARA	9	4.522.500
491	KEPALA SEKSI PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN	9	4.522.500
492	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JASMANI DAN KESENIAN	9	4.522.500
493	KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI NARAPIDANA DAN PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	12	8.210.250
494	KEPALA SEKSI ASIMILASI NARAPIDANA	9	4.522.500
495	KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA UMUM	9	4.522.500
496	KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA KHUSUS	9	4.522.500
497	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
498	KEPALA SUBDIREKTORAT LATIHAN KETERAMPILAN	12	8.210.250
499	KEPALA SEKSI STANDARDISASI PELATIHAN KETERAMPILAN	9	4.522.500
500	KEPALA SEKSI LATIHAN KERJA	9	4.522.500
501	KEPALA SEKSI KEMITRAAN	9	4.522.500
502	KEPALA SUBDIREKTORAT KEGIATAN KERJA PRODUKSI	12	8.210.250
503	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA	9	4.522.500
504	KEPALA SEKSI KEGIATAN AGRIBISNIS	9	4.522.500
505	KEPALA SEKSI PEMASARAN	9	4.522.500
506	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN HASIL KERJA	9	4.522.500
507	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
508	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17	27.577.500
509	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15	15.997.500
510	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN		
511	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
512	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
513	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
514	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
515	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
516	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	4.522.500
517	KEPALA SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
518	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
519	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
520	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
521	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	4.522.500
522	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI PELAPORAN	9	4.522.500
523	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	8.210.250
524	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
525	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
526	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
527	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	8.210.250
528	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
529	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN PERSURATAN	9	4.522.500
530	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
531	DIREKTUR PERDATA	15	15.997.500
532	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERDATA UMUM		
533	KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM	9	4.522.500
534	KEPALA SEKSI LEGALISASI	9	4.522.500
535	KEPALA SEKSI ADVOKASI KEPERDATAAN	9	4.522.500
536	KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH TERSUMPAH	9	4.522.500
537	KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM	12	8.210.250
538	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP	9	4.522.500
539	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL	9	4.522.500
540	KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	9	4.522.500
541	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM	9	4.522.500
542	KEPALA SUBDIREKTORAT JAMINAN FIDUSIA	12	8.210.250
543	KEPALA SEKSI PELAYANAN FIDUSIA	9	4.522.500
544	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA	9	4.522.500
545	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI FIDUSIA	9	4.522.500
546	KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA	12	8.210.250
547	KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN DAN PENDAFTARAN KURATOR	9	4.522.500
548	KEPALA SEKSI DAFTAR PUSAT WASIAT	9	4.522.500
549	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN KURATOR DAN WASIAT	9	4.522.500
550	KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	12	8.210.250
551	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS	9	4.522.500
552	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	9	4.522.500
553	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI NOTARIAT DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS	9	4.522.500
554	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
555	DIREKTUR PIDANA	15	15.997.500
556	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
557	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA	9	4.522.500
558	KEPALA SEKSI PELAYANAN GRASI	9	4.522.500
559	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	4.522.500
560	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	8.210.250
561	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN PEMUTASIAN, DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	4.522.500
562	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	4.522.500
563	KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI	12	8.210.250
564	KEPALA SEKSI PERUMUSAN	9	4.522.500
565	KEPALA SEKSI DATA DAN IDENTIFIKASI	9	4.522.500
566	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP TERAAN	9	4.522.500
567	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
568	DIREKTUR TATA NEGARA	15	15.997.500
569	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN	12	8.210.250
570	KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
571	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
572	KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
573	KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN	12	8.210.250
574	KEPALA SEKSI ANALISIS DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
575	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
576	KEPALA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK	12	8.210.250
577	KEPALA SEKSI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK	9	4.522.500
578	KEPALA SEKSI ANALISIS PERTIMBANGAN DAN ADVOKASI PARTAI POLITIK	9	4.522.500
579	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PARTAI POLITIK	9	4.522.500
580	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
581	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	15.997.500
582	KEPALA SUBDIREKTORAT BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	12	8.210.250
583	KEPALA SEKSI PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	9	4.522.500
584	KEPALA SEKSI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	9	4.522.500
585	KEPALA SUBDIREKTORAT EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	12	8.210.250
586	KEPALA SEKSI PENANGANAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	4.522.500
587	KEPALA SEKSI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	4.522.500
588	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL	12	8.210.250
589	KEPALA SEKSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	9	4.522.500
590	KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	9	4.522.500
591	KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER	9	4.522.500
592	KEPALA SEKSI HUKUM LAUT, UDARA, ANGKASA DAN LINGKUNGAN	9	4.522.500
593	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
594	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	15.997.500
595	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN DUKUNGAN TEKNIS	12	8.210.250
596	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
597	KEPALA SEKSI DUKUNGAN TEKNIS	9	4.522.500
598	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PERANGKAT KERAS	12	8.210.250
599	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA	9	4.522.500
600	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS	9	4.522.500
601	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK	12	8.210.250
602	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BASIS DATA	9	4.522.500
603	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
604	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
605	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17	27.577.500
606	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	15.997.500
607	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
608	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
609	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
610	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
611	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
612	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
613	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
614	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	4.522.500
615	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
616	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
617	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
618	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	4.522.500
619	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
620	KEPALA BAGIAN UMUM, PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN	12	8.210.250
621	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
622	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
623	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9	4.522.500
624	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
625	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
626	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
627	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
628	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15	15.997.500
629	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	8.210.250
630	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	4.522.500
631	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PUBLIKASI	9	4.522.500
632	KEPALA SEKSI VERIFIKASI CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT	9	4.522.500
633	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI	12	8.210.250
634	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	4.522.500
635	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN DOKUMENTASI	12	8.210.250
636	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI	9	4.522.500
637	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	4.522.500
638	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	12	8.210.250
639	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	4.522.500
640	KEPALA SEKSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	9	4.522.500
641	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
642	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15	15.997.500
643	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	8.210.250
644	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	4.522.500
645	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
646	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENELUSURAN PATEN		
647	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI PATEN	9	4.522.500
648	KEPALA SEKSI PENELUSURAN PATEN	9	4.522.500
649	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN PATEN	12	8.210.250
650	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	4.522.500
651	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	12	8.210.250
652	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	4.522.500
653	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	9	4.522.500
654	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	12	8.210.250
655	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	4.522.500
656	KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	9	4.522.500
657	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
658	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15	15.997.500
659	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	8.210.250
660	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN DAN KLASIFIKASI	9	4.522.500
661	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
662	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN MEREK	12	8.210.250
663	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	4.522.500
664	KEPALA SUBDIREKTORAT INDIKASI GEOGRAFIS	12	8.210.250
665	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN INDIKASI GEOGRAFIS	9	4.522.500
666	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS	9	4.522.500
667	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN MONITORING MEREK TERDAFTAR	12	8.210.250
668	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	4.522.500
669	KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
670	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN MONITORING	9	4.522.500
671	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	12	8.210.250
672	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	4.522.500
673	KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	9	4.522.500
674	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
675	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	15.997.500
676	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	12	8.210.250
677	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	4.522.500
678	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PROMOSI	9	4.522.500
679	KEPALA SEKSI INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
680	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	8.210.250
681	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	4.522.500
682	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	4.522.500
683	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL	9	4.522.500
684	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	8.210.250
685	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA PEMERINTAH	9	4.522.500
686	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH DAN MONITORING KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	4.522.500
687	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
688	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	15.997.500
689	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN	12	8.210.250
690	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
691	KEPALA SEKSI PORTAL WEB	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
692	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDUKUNG INFRASTRUKTUR	12	8.210.250
693	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	9	4.522.500
694	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN	9	4.522.500
695	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	12	8.210.250
696	KEPALA SEKSI APLIKASI	9	4.522.500
697	KEPALA SEKSI DATABASE DAN KEAMANAN DATA	9	4.522.500
698	KEPALA SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFOMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	4.522.500
699	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
700	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	15	15.997.500
701	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGADUAN DAN ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	8.210.250
702	KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN	9	4.522.500
703	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
704	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN	12	8.210.250
705	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	4.522.500
706	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN BARANG BUKTI	9	4.522.500
707	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	12	8.210.250
708	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	4.522.500
709	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF	9	4.522.500
710	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
711	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17	27.577.500
712	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
713	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
714	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
715	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
716	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
717	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
718	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
719	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	4.522.500
720	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
721	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
722	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
723	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
724	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	8.210.250
725	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
726	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
727	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	8.210.250
728	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	4.522.500
729	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN	9	4.522.500
730	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15	15.997.500
731	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH I	12	8.210.250
732	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH I	9	4.522.500
733	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH I	9	4.522.500
734	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH II	12	8.210.250
735	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH II	9	4.522.500
736	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH II	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
737	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH III	12	8.210.250
738	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH III	9	4.522.500
739	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH III	9	4.522.500
740	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH IV	12	8.210.250
741	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH IV	9	4.522.500
742	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH IV	9	4.522.500
743	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
744	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
745	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	8.210.250
746	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.A	9	4.522.500
747	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.B	9	4.522.500
748	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.C	9	4.522.500
749	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	8.210.250
750	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	4.522.500
751	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	4.522.500
752	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	4.522.500
753	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	8.210.250
754	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.A	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
755	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.B	9	4.522.500
756	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.C	9	4.522.500
757	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
758	DIREKTUR DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
759	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
760	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
761	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
762	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	4.522.500
763	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
764	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
765	KEPALA SEKSI TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
766	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	4.522.500
767	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	8.210.250
768	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IA	9	4.522.500
769	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IB	9	4.522.500
770	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IC	9	4.522.500
771	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	8.210.250
772	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIA		
773	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIB	9	4.522.500
774	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIC	9	4.522.500
775	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	12	8.210.250
776	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIA	9	4.522.500
777	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIB	9	4.522.500
778	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIC	9	4.522.500
779	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
780	DIREKTUR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
781	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	12	8.210.250
782	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
783	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
784	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
785	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	8.210.250
786	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
787	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
788	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
789	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	12	8.210.250
790	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	4.522.500
791	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	4.522.500
792	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	4.522.500
793	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
794	DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
795	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12	8.210.250
796	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	4.522.500
797	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	4.522.500
798	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI MEDIA	12	8.210.250
799	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA CETAK	9	4.522.500
800	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK	9	4.522.500
801	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ONLINE	9	4.522.500
802	KEPALA SUBDIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI	12	8.210.250
803	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
804	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	4.522.500
805	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
806	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17	27.577.500
807	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
808	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
809	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
810	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN,	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAPORAN		
811	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
812	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	4.522.500
813	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
814	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
815	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
816	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9	4.522.500
817	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	8.210.250
818	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
819	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PERSURATAN	9	4.522.500
820	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
821	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA	12	8.210.250
822	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
823	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA	9	4.522.500
824	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
825	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
826	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	9	4.522.500
827	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
828	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	12	8.210.250
829	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	UNDANG-UNDANG		
830	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	9	4.522.500
831	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12	8.210.250
832	KEPALA SEKSI PEMBAHASAN I	9	4.522.500
833	KEPALA SEKSI PEMBAHASAN II	9	4.522.500
834	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
835	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN	9	4.522.500
836	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
837	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
838	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15	15.997.500
839	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	12	8.210.250
840	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG POLITIK	9	4.522.500
841	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PEMERINTAHAN	9	4.522.500
842	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	12	8.210.250
843	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN	9	4.522.500
844	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KEAMANAN	9	4.522.500
845	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
846	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I	9	4.522.500
847	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA II	9	4.522.500
848	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
849	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN	9	4.522.500
850	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	4.522.500
851	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
852	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
853	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN	12	8.210.250
854	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
855	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
856	KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
857	KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, KEAMANAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	4.522.500
858	KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	9	4.522.500
859	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
860	KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9	4.522.500
861	KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9	4.522.500
862	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
863	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	9	4.522.500
864	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
865	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
866	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN	15	15.997.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERUNDANG-UNDANGAN		
867	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN	12	8.210.250
868	KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN I	9	4.522.500
869	KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN II	9	4.522.500
870	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN	12	8.210.250
871	KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN I	9	4.522.500
872	KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN II	9	4.522.500
873	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	8.210.250
874	KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT I	9	4.522.500
875	KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT II	9	4.522.500
876	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
877	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
878	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI	12	8.210.250
879	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	9	4.522.500
880	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
881	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	12	8.210.250
882	KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH I	9	4.522.500
883	KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH II	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
884	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN BIMBINGAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
885	KEPALA SEKSI STANDARDISASI, PEDOMAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
886	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
887	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
888	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
889	KEPALA SEKSI PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
890	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
891	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15	15.997.500
892	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN PENANAMAN MODAL	12	8.210.250
893	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG MONETER DAN JASA KEUANGAN	9	4.522.500
894	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	9	4.522.500
895	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN FISKAL	12	8.210.250
896	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PENGANGGARAN, DAN PERBENDAHARAAN NEGARA	9	4.522.500
897	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PENERIMAAN NEGARA, CUKAI, DAN KEPABEANAN	9	4.522.500
898	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN,	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG		
899	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	9	4.522.500
900	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG	9	4.522.500
901	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	12	8.210.250
902	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	4.522.500
903	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI	9	4.522.500
904	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
905	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	27.577.500
906	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
907	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA	12	8.210.250
908	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
909	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	9	4.522.500
910	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
911	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
912	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN MUTASI KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
913	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI	9	4.522.500
914	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
915	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
916	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
917	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
918	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
919	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM	12	8.210.250
920	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
921	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	9	4.522.500
922	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	4.522.500
923	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15	15.997.500
924	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	8.210.250
925	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9	4.522.500
926	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	4.522.500
927	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	8.210.250
928	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	4.522.500
929	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4.522.500
930	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
931	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	4.522.500
932	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	4.522.500
933	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
934	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
935	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	8.210.250
936	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9	4.522.500
937	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	4.522.500
938	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	8.210.250
939	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	4.522.500
940	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
941	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
942	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	4.522.500
943	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	4.522.500
944	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
945	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15	15.997.500
946	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	8.210.250
947	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	4.522.500
948	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
949	KEPALA BIDANG PENYELENGARAAN	12	8.210.250
950	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI KOMPETENSI	9	4.522.500
951	KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN KOMPETENSI	9	4.522.500
952	KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI	12	8.210.250
953	KEPALA SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
954	KEPALA SUBBIDANG SISTEM DAN JARINGAN	9	4.522.500
955	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
956	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17	27.577.500
957	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
958	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
959	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
960	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
961	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
962	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
963	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
964	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
965	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
966	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
967	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
968	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
969	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
970	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA DAN TATA USAHA	12	8.210.250
971	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN	9	4.522.500
972	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KERJA SAMA	9	4.522.500
973	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	4.522.500
974	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	8.210.250
975	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
976	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
977	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
978	KEPALA BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN	12	8.210.250
979	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN I	9	4.522.500
980	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN II	9	4.522.500
981	KEPALA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR	12	8.210.250
982	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR I	9	4.522.500
983	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR II	9	4.522.500
984	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	12	8.210.250
985	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP I	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
986	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP II	9	4.522.500
987	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA	12	8.210.250
988	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA I	9	4.522.500
989	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA II	9	4.522.500
990	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
991	KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
992	KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	12	8.210.250
993	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP	9	4.522.500
994	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA	9	4.522.500
995	KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI	12	8.210.250
996	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL	9	4.522.500
997	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DAN FASILITASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH	9	4.522.500
998	KEPALA BIDANG PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	12	8.210.250
999	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP	9	4.522.500
1000	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA	9	4.522.500
1001	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1002	KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
1003	KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM	12	8.210.250
1004	KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	9	4.522.500
1005	KEPALA SUBBIDANG DIGITALISASI DOKUMEN HUKUM	9	4.522.500
1006	KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI HUKUM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1007	KEPALA SUBBIDANG PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN KOLEKSI	9	4.522.500
1008	KEPALA SUBBIDANG SIRKULASI DAN REFERENSI	9	4.522.500
1009	KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM	12	8.210.250
1010	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN JARINGAN	9	4.522.500
1011	KEPALA SUBBIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI HUKUM	9	4.522.500
1012	KEPALA SUBBIDANG TATA USAHA	9	4.522.500
1013	KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	15	15.997.500
1014	KEPALA BIDANG PENYULUHAN HUKUM	12	8.210.250
1015	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM	9	4.522.500
1016	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PENYULUH HUKUM	9	4.522.500
1017	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM	12	8.210.250
1018	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	9	4.522.500
1019	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM	9	4.522.500
1020	KEPALA BIDANG BANTUAN HUKUM	12	8.210.250
1021	KEPALA SUBBIDANG PROGRAM BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
1022	KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
1023	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1024	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	27.577.500
1025	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
1026	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
1027	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
1028	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN		
1029	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
1030	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
1031	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
1032	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500
1033	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
1034	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
1035	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
1036	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	8.210.250
1037	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
1038	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
1039	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	8.210.250
1040	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	4.522.500
1041	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN	9	4.522.500
1042	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	15	15.997.500
1043	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBTANSI HUKUM	12	8.210.250
1044	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FORMULASI HUKUM	9	4.522.500
1045	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI HUKUM	9	4.522.500
1046	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR HUKUM	12	8.210.250
1047	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM	9	4.522.500
1048	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM	9	4.522.500
1049	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1050	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT HUKUM	9	4.522.500
1051	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	9	4.522.500
1052	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1053	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
1054	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL DAN POLITIK	12	8.210.250
1055	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL	9	4.522.500
1056	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK POLITIK	9	4.522.500
1057	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	8.210.250
1058	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI	9	4.522.500
1059	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
1060	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK	12	8.210.250
1061	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
1062	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
1063	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1064	KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15	15.997.500
1065	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	12	8.210.250
1066	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1067	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETATALAKSANAAN	9	4.522.500
1068	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	8.210.250
1069	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	9	4.522.500
1070	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4.522.500
1071	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI	12	8.210.250
1072	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1073	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI	9	4.522.500
1074	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1075	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
1076	KEPALA BIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
1077	KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM	9	4.522.500
1078	KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1079	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
1080	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1081	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1082	KEPALA BIDANG FASILITASI PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
1083	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM	9	4.522.500
1084	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1085	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1086	KEPALA KANTOR WILAYAH	15	15.997.500
1087	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14	14.160.000
1088	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
1089	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	9	4.522.500
1090	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
1091	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
1092	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	4.522.500
1093	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PELAPORAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
1094	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14	14.160.000
1095	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN, PENGENTASAN ANAK, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12	8.210.250
1096	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	9	4.522.500
1097	KEPALA SUBBIDANG REGISTRASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	4.522.500
1098	KEPALA BIDANG KEAMANAN, KESEHATAN, PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN, DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	8.210.250
1099	KEPALA SUBBIDANG KEAMANAN	9	4.522.500
1100	KEPALA SUBBIDANG PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN, PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	4.522.500
1101	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14	14.160.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1102	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
1103	KEPALA SUBBIDANG LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1104	KEPALA SUBBIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1105	KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
1106	KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1107	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1108	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14	14.160.000
1109	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12	8.210.250
1110	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	4.522.500
1111	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
1112	KEPALA BIDANG HUKUM	12	8.210.250
1113	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	9	4.522.500
1114	KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	9	4.522.500
1115	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
1116	KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1117	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN, PENGKAJIAN DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1118	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14	14.160.000
1119	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11	7.020.000
1120	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	7.020.000
1121	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1122	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
1123	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
1124	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI	11	7.020.000
1125	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9	4.522.500
1126	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1127	KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI	9	4.522.500
1128	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11	7.020.000
1129	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9	4.522.500
1130	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9	4.522.500
1131	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9	4.522.500
1132	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11	7.020.000
1133	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9	4.522.500
1134	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1135	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12	8.210.250
1136	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1137	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1138	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1139	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1140	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	4.522.500
1141	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1142	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	3.930.000
1143	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1144	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	3.930.000
1145	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	3.930.000
1146	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1147	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1148	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1149	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KELAS IIA NARKOTIKA		
1150	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1151	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1152	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1153	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1154	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	4.522.500
1155	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1156	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	3.930.000
1157	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1158	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	3.930.000
1159	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	3.930.000
1160	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1161	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1162	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1163	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12	8.210.250
1164	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1166	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1167	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1168	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1169	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1170	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8	3.930.000
1171	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	3.930.000
1172	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1173	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1174	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1175	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12	8.210.250
1176	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1177	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1178	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1179	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1180	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1181	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1182	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK	8	3.930.000
1183	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	3.930.000
1184	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1185	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1186	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1187	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10	5.197.500
1188	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1189	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8	3.930.000
1190	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8	3.930.000
1191	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8	3.930.000
1192	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12	8.210.250
1193	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	9	4.522.500
1194	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1195	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9	4.522.500
1196	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8	3.930.000
1197	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1198	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	3.930.000
1199	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9	4.522.500
1200	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	3.930.000
1201	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8	3.930.000
1202	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10	5.197.500
1203	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	3.930.000
1204	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	3.930.000
1205	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	3.930.000
1206	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	3.930.000
1207	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10	5.197.500
1208	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	3.930.000
1209	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	3.930.000
1210	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	3.930.000
1211	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12	8.210.250
1212	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1213	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1214	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1215	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1216	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9	4.522.500
1217	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1218	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1219	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	3.930.000
1220	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9	4.522.500
1221	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1222	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1223	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	3.930.000
1224	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10	5.197.500
1225	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1226	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8	3.930.000
1227	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8	3.930.000
1228	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10	5.197.500
1229	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8	3.930.000
1230	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	3.930.000
1231	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10	5.197.500
1232	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	3.930.000
1233	KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA	10	5.197.500
1234	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN CABANG RUTAN	8	3.930.000
1235	KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN	12	8.210.250
1236	SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN	10	5.197.500
1237	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9	4.522.500
1238	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	9	4.522.500
1239	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	9	4.522.500
1240	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1241	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1242	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1243	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1244	KEPALA URUSAN HARTA PENINGGALAN DAN KEPAILITAN	8	3.930.000
1245	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS	14	14.160.000
1246	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	7.020.000
1247	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	4.522.500
1248	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
1249	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11	7.020.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1250	KEPALA SEKSI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1251	KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1252	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11	7.020.000
1253	KEPALA SEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1254	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1255	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	7.020.000
1256	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1257	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1258	KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK	11	7.020.000
1259	KEPALA SEKSI UNIT A	10	5.197.500
1260	KEPALA SEKSI UNIT B	10	5.197.500
1261	KEPALA SEKSI UNIT C	10	5.197.500
1262	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I	12	8.210.250
1263	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1264	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8	3.930.000
1265	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8	3.930.000
1266	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1267	KEPALA SUBSEKSI LINTAS BATAS	8	3.930.000
1268	KEPALA SUBSEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1269	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1270	KEPALA SUBSEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1271	KEPALA SUBSEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1272	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1273	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1274	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1275	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1276	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1277	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1278	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1279	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II	11	7.020.000
1280	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1281	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1282	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1283	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1284	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1285	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8	3.930.000
1286	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8	3.930.000
1287	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1288	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1289	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1290	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1291	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1292	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1293	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III	10	5.197.500
1294	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1295	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1296	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI, SARANA KOMUNIKASI, DAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1297	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14	14.160.000
1298	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	7.020.000
1299	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
1300	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
1301	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1302	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11	7.020.000
1303	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
1304	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	4.522.500
1305	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9	4.522.500
1306	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11	7.020.000
1307	KEPALA SEKSI KEAMANAN	10	5.197.500
1308	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9	4.522.500
1309	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9	4.522.500
1310	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12	8.210.250
1311	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1312	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1313	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1314	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1315	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
1316	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1317	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8	3.930.000
1318	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9	4.522.500
1319	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	3.930.000
1320	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8	3.930.000
1321	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	10	5.197.500
1322	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	9	4.522.500
1323	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	9	4.522.500
1324	KEPALA RUMAH SAKIT	12	8.210.250
1325	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1326	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500

B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PERANCANG PERATURAN PERUU		
	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	8	3.930.000
	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	9	4.522.500
	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	11	7.020.000
	PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA	13	9.277.500
2	PEMERIKSA PATEN AHLI		
	PEMERIKSA PATEN PERTAMA	8	3.930.000
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9	4.522.500
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11	7.020.000
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13	9.277.500
3	PEMERIKSA MEREK AHLI		
	PEMERIKSA MEREK PERTAMA	8	3.930.000
	PEMERIKSA MEREK MUDA	9	4.522.500
	PEMERIKSA MEREK MADYA	11	7.020.000
	PEMERIKSA MEREK UTAMA	13	9.277.500
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL		
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6	2.850.000
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	PEMERIKSA MEREK PENYELIA	8	3.930.000
5	DOKTER/SPELIALIS		
	DOKTER PERTAMA	8	3.930.000
	DOKTER MUDA	9	4.522.500
	DOKTER MADYA	11	7.020.000
	DOKTER UTAMA	13	9.277.500
6	DOKTER GIGI/SPELIALIS		
	DOKTER GIGI PERTAMA	8	3.930.000
	DOKTER GIGI MUDA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DOKTER GIGI MADYA	11	7.020.000
	DOKTER GIGI UTAMA	13	9.277.500
7	PERAWAT GIGI		
	PERAWAT GIGI PEMULA	5	2.531.250
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	2.850.000
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	3.930.000
8	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	3.930.000
	PERAWAT AHLI MUDA	9	4.522.500
	PERAWAT AHLI MADYA	11	7.020.000
	PERAWAT AHLI UTAMA	13	9.277.500
9	PERAWAT TERAMPIL	6	2.850.000
	PERAWAT MAHIR	7	3.277.500
	PERAWAT PENYELIA	8	3.930.000
10	ARSIPARIS AHLI		
	ARSIPARIS PERTAMA	8	3.930.000
	ARSIPARIS MUDA	9	4.522.500
	ARSIPARIS MADYA	11	7.020.000
	ARSIPARIS UTAMA	13	9.277.500
11	ARSIPARIS TERAMPIL		
	ARSIPARIS PELAKSANA	6	2.850.000
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	ARSIPARIS PENYELIA	8	3.930.000
12	PUSTAKAWAN AHLI		
	PUSTAKAWAN PERTAMA	8	3.930.000
	PUSTAKAWAN MUDA	9	4.522.500
	PUSTAKAWAN MADYA	11	7.020.000
	PUSTAKAWAN UTAMA	13	9.277.500

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
13	PUSTAKAWAN TERAMPIL		
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6	2.850.000
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8	3.930.000
14	WIDYAISWARA AHLI		
	WIDYAISWARA PERTAMA	8	3.930.000
	WIDYAISWARA MUDA	9	4.522.500
	WIDYAISWARA MADYA	11	7.020.000
	WIDYAISWARA UTAMA	13	9.277.500
15	PENELITI AHLI		
	PENELITI PERTAMA	8	3.930.000
	PENELITI MUDA	9	4.522.500
	PENELITI MADYA	11	7.020.000
	PENELITI UTAMA	13	9.277.500
16	AUDITOR AHLI		
	AUDITOR PERTAMA	8	3.930.000
	AUDITOR MUDA	9	4.522.500
	AUDITOR MADYA	11	7.020.000
	AUDITOR UTAMA	13	9.277.500
17	AUDITOR TERAMPIL		
	AUDITOR PELAKSANA	6	2.850.000
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	AUDITOR PENYELIA	8	3.930.000
18	PRANATA KOMPUTER AHLI		
	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	3.930.000
	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	4.522.500
	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	7.020.000
	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	9.277.500

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
19	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL		
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	2.850.000
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	3.930.000
20	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	2.850.000
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	3.930.000
21	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	3.930.000
	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	4.522.500
	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11	7.020.000
	ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA	13	9.277.500
22	PSIKOLOG KLINIS AHLI		
	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	8	3.930.000
	PSIKOLOG KLINIS MUDA	9	4.522.500
	PSIKOLOG KLINIS MADYA	11	7.020.000
	PSIKOLOG KLINIS UTAMA	13	9.277.500
23	PENERJEMAH AHLI		
	PENERJEMAH PERTAMA	8	3.930.000
	PENERJEMAH MUDA	9	4.522.500
	PENERJEMAH MADYA	11	7.020.000
	PENERJEMAH UTAMA	13	9.277.500
24	APOTEKER AHLI		
	APOTEKER PERTAMA	8	3.930.000
	APOTEKER MUDA	9	4.522.500
	APOTEKER MADYA	11	7.020.000
	APOTEKER UTAMA	13	9.277.500

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
25	ASISTEN APOTEKER		
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5	2.531.250
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	2.850.000
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	3.930.000
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8	3.930.000
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9	4.522.500
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11	7.020.000
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA	13	9.277.500
27	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5	2.531.250
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	2.850.000
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7	3.277.500
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	3.930.000
28	FISIOTERAPIS AHLI		
	FISIOTERAPIS PERTAMA	8	3.930.000
	FISIOTERAPIS MUDA	9	4.522.500
	FISIOTERAPIS MADYA	11	7.020.000
	FISIOTERAPIS UTAMA	13	9.277.500
29	FISIOTERAPIS TERAMPIL		
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	5	2.531.250
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
30	RADIOGRAFER TERAMPIL		
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	2.850.000
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	RADIOGRAFER PENYELIA	8	3.930.000
31	PEREKAM MEDIS		
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	2.850.000
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8	3.930.000
32	NUTRISIONIS AHLI		
	NUTRISIONIS PERTAMA	8	3.930.000
	NUTRISIONIS MUDA	9	4.522.500
	NUTRISIONIS MADYA	11	7.020.000
	NUTRISIONIS UTAMA	13	9.277.500
33	NUTRISIONIS TERAMPIL		
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	2.850.000
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	NUTRISIONIS PENYELIA	8	3.930.000
34	ADMINISTRATOR KESEHATAN		
	ADMINISTRATOR PERTAMA	8	3.930.000
	ADMINISTRATOR MUDA	9	4.522.500
	ADMINISTRATOR MADYA	11	7.020.000
	ADMINISTRATOR UTAMA	13	9.277.500
35	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI		
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8	3.930.000
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9	4.522.500
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11	7.020.000
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13	9.277.500
36	BIDAN AHLI		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BIDAN PERTAMA	8	3.930.000
	BIDAN MUDA	9	4.522.500
	BIDAN MADYA	11	7.020.000
	BIDAN UTAMA	13	9.277.500
37	BIDAN TERAMPIL		
	BIDAN PELAKSANA PEMULA	5	2.531.250
	BIDAN PELAKSANA	6	2.850.000
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	BIDAN PENYELIA	8	3.930.000
38	PENYIDIK PPNS		
	PENYIDIK PPNS PERTAMA	8	3.930.000
	PENYIDIK PPNS MUDA	9	4.522.500
	PENYIDIK PPNS MADYA	11	7.020.000
	PENYIDIK PPNS UTAMA	13	9.277.500
39	PENYULUH HUKUM AHLI		
	PENYULUH HUKUM PERTAMA	8	3.930.000
	PENYULUH HUKUM MUDA	9	4.522.500
	PENYULUH HUKUM MADYA	11	7.020.000
	PENYULUH HUKUM UTAMA	13	9.277.500
40	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI		
	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	8	3.930.000
	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA	9	4.522.500
	ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA	11	7.020.000
	ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA	13	9.277.500
41	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL		
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5	2.531.250
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	6	2.850.000
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.277.500

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	8	3.930.000
40	DEBENCANA AHLI		
	DEBENCANA DEPTAMA	9	2.030.000
	DEBENCANA MUDA	0	1.522.500
42	ANALIS KEPERLUKIAN AHLI		
	ANALIS KEPERLUKIAN DEPTAMA	9	2.030.000
	ANALIS KEPERLUKIAN MUDA	0	1.522.500
44	DENCADAAN BARANG DAN LASA AHLI		
	DENCADAAN BARANG DAN LASA DEPTAMA	9	2.030.000
	DENCADAAN BARANG DAN LASA MUDA	0	1.522.500
45	AUDITOR KEDECAWAJIAN AHLI		
	AUDITOR KEDECAWAJIAN DEPTAMA	9	2.030.000
	AUDITOR KEDECAWAJIAN MUDA	0	1.522.500
46	ASESOP SUMBER DAYA MANUSIA		
	ASESOP SUMBER DAYA MANUSIA	9	2.030.000
	ASESOP SUMBER DAYA MANUSIA	0	1.522.500

C. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI			
1	STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN	16	24.405.000
2	STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	16	24.405.000
3	STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	16	24.405.000
4	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	16	24.405.000
5	STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN	16	24.405.000
6	STAF KHUSUS MENTERI	16	24.405.000
ANGGOTA TEKNIS BHP			
	ANGGOTA TEKNIS HUKUM	10	5.197.500
FUNGSIONAL UMUM			
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8	3.930.000
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8	3.930.000
3	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
4	ANALIS JABATAN	7	3.277.500
5	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7	3.277.500
6	ANALIS KELEMBAGAAN	7	3.277.500
7	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
8	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7	3.277.500
9	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7	3.277.500
10	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7	3.277.500
11	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7	3.277.500
12	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7	3.277.500
13	ANALIS PERATURAN DAERAH	7	3.277.500

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
14	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.277.500
15	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7	3.277.500
16	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7	3.277.500
17	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7	3.277.500
18	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7	3.277.500
19	ANALIS PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.277.500
20	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7	3.277.500
21	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7	3.277.500
22	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7	3.277.500
23	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7	3.277.500
24	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7	3.277.500
25	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
26	ANALIS SIDIK JARI	7	3.277.500
27	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7	3.277.500
28	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7	3.277.500
29	ANALIS STANDARDISASI SARANA KERJA	7	3.277.500
30	BENDAHARA PENERIMAAN SATKER	7	3.277.500
31	BENDAHARA PENGELUARAN SATKER	7	3.277.500
32	NAHKODA	7	3.277.500
33	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	7	3.277.500
34	PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7	3.277.500
35	PENELAAH KEIMIGRASIAN	7	3.277.500
36	PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7	3.277.500
37	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7	3.277.500
38	PENERJEMAH BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
39	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3.277.500
40	PENYULUH HAM	7	3.277.500
41	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7	3.277.500
42	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7	3.277.500

43	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7	3.277.500
44	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7	3.277.500
45	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.277.500
46	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7	3.277.500
47	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	3.277.500
48	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7	3.277.500
49	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
50	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7	3.277.500
51	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7	3.277.500
52	PENYUSUN PROGRAM	7	3.277.500
NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
53	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7	3.277.500
54	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	2.850.000
55	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7	2.850.000
56	DOKUMENTALIS HUKUM	6	2.850.000
57	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6	2.850.000
58	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	6	2.850.000
59	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6	2.850.000
60	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6	2.850.000
61	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2.850.000
62	PENGELOLA BASAN/BARAN	6	2.850.000
63	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6	2.850.000
64	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	2.850.000
65	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6	2.850.000
66	PENGELOLA HASIL KERJA	6	2.850.000
67	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6	2.850.000
68	PENGELOLA KEUANGAN	6	2.850.000
69	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6	2.850.000
70	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6	2.850.000
71	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6	2.850.000

72	PENGELOLA PEMBINAAN KEPERIBADIAN	6	2.850.000
73	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6	2.850.000
74	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6	2.850.000
75	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6	2.850.000
76	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6	2.850.000
77	PENGELOLA SARANA KERJA	6	2.850.000
78	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6	2.850.000
79	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS	6	2.850.000
80	PENGELOLA WEBSITE	6	2.850.000
81	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6	2.850.000
82	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2.850.000
83	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2.850.000
84	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6	2.850.000
85	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6	2.850.000
86	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	2.850.000
NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
87	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2.850.000
88	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6	2.850.000
89	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	2.850.000
90	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	2.850.000
91	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6	2.850.000
92	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6	2.850.000
93	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6	2.850.000
94	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6	2.850.000
95	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6	2.850.000

96	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6	2.850.000
97	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6	2.850.000
98	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM	6	2.850.000
99	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6	2.850.000
100	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6	2.850.000
101	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6	2.850.000
102	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6	2.850.000
103	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6	2.850.000
104	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6	2.850.000
105	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6	2.850.000
106	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6	2.850.000
107	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTARBADAN INTERNASIONAL	6	2.850.000
108	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6	2.850.000
109	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6	2.850.000
110	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6	2.850.000
111	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6	2.850.000
112	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6	2.850.000
113	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6	2.850.000
114	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6	2.850.000
115	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	2.850.000
116	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	2.850.000
117	PENGOLAH DATA LAPORAN	6	2.850.000
118	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6	2.850.000

119	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	2.850.000
120	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN	6	2.850.000
121	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	2.850.000
122	PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT	6	2.850.000
123	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6	2.850.000
124	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2.850.000
125	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6	2.850.000
126	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM	6	2.850.000
127	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6	2.850.000
128	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6	2.850.000
129	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6	2.850.000
130	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	2.850.000
131	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6	2.850.000
132	PENGOLAH DATA WASIAT	6	2.850.000
133	PENGOLAH SAI	6	2.850.000
134	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6	2.850.000
135	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6	2.850.000
136	ROHANIawan AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6	2.850.000
137	SEKRETARIS PIMPINAN	6	2.531.250
138	TEKNISI JARINGAN	6	2.531.250
139	VERIFIKATOR	6	2.531.250
140	OPERATOR KOMPUTER	5	2.531.250
141	PEMBUAT DAFTAR GAJI	5	2.531.250
142	PEMELIHARA KANTOR	5	2.531.250
143	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5	2.531.250
144	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5	2.531.250

145	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5	2.531.250
146	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5	2.531.250
147	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5	2.531.250
148	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5	2.531.250
149	PEMROSES LEGALISASI	5	2.531.250
150	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5	2.531.250
151	PEMROSES PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5	2.531.250
152	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI	5	2.531.250
153	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
154	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5	2.531.250
155	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	2.531.250
156	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5	2.531.250
157	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5	2.531.250
158	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	5	2.531.250
159	PENATAUSAHAAN	5	2.531.250
160	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5	2.531.250
161	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5	2.531.250
162	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5	2.531.250
163	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5	2.531.250
164	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
165	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5	2.531.250
166	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5	2.531.250
167	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5	2.531.250
168	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5	2.531.250
169	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	2.531.250
170	PENGADMINISTRASI UMUM	5	2.531.250
171	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
172	PENGAMBIL SIDIK JARI	5	2.531.250

173	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5	2.531.250
174	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5	2.531.250
175	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5	2.531.250
176	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5	2.531.250
177	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5	2.531.250
178	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5	2.531.250
179	PENGELOLA TATA NASKAH	5	2.531.250
180	PENGHIMPUN BERITA	5	2.531.250
181	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2.531.250
182	PENGHUBUNG ANTARLEMBAGA	5	2.531.250
183	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5	2.531.250
184	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	2.531.250
185	PENGOLAH ARSIP TERAAN	5	2.531.250
186	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5	2.531.250
187	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5	2.531.250
188	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5	2.531.250
189	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5	2.531.250
190	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN	5	2.531.250
191	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
192	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
193	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5	2.531.250
194	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5	2.531.250
195	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
196	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5	2.531.250
197	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
198	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
199	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5	2.531.250
200	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5	2.531.250
201	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5	2.531.250
202	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5	2.531.250

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
203	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5	2.531.250
204	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5	2.531.250
205	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5	2.531.250
206	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5	2.531.250
207	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5	2.531.250
208	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	2.531.250
209	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5	2.531.250
210	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5	2.531.250
211	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5	2.531.250
212	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5	2.531.250
213	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
214	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5	2.531.250
215	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5	2.531.250
216	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5	2.531.250
217	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
218	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5	2.531.250
219	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	2.531.250
220	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5	2.531.250
221	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5	2.531.250
222	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5	2.531.250
223	PETUGAS PROTOKOL	5	2.531.250
224	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5	2.531.250
225	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5	2.531.250
226	TEKNISI	5	2.531.250
227	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4	2.365.500
228	OPERATOR MESIN	4	2.365.500

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
229	OPERATOR TELEPON	4	2.365.500
230	PRAMU ACARA	4	2.365.500
231	TARUNA AKADEMI	4	2.365.500
232	PENGEMUDI	3	2.211.000
233	AGENDARIS	3	2.211.000
234	PETUGAS PENGGANDAAN	3	2.211.000
235	CARAKA	3	2.211.000

D. PERMOHONAN IZIN

KOP SURAT

PERMOHONAN IZIN

(Tidak Masuk/Terlambat Masuk Kerja/Pulang Sebelum Waktunya/Tidak Berada di Tempat Tugas/Tidak Melakukan Rekam Kehadiran)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari..... tanggal saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena

....., 20....

Persetujuan atasan langsung,
.....,

.....

*) coret yang tidak perlu.

E. SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

pada hari..... tanggal tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu

....., 20....

Atasan Langsung,

.....

NIP.

*) coret yang tidak perlu.

F. LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

KOP SURAT

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

1. DATA PEGAWAI

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Gol. :
d. Jabatan :

2. CAPAIAN NILAI SKP

- a. Nomordantanggal SKP :
b. Periode : Januari – Juli/ Juli – Desember (coret salah satu)
c. Nilai SKP :

3. KETAATAN TERHADAP PENENTUAN KEHADIRAN

No	Uraian	Potongan per kejadian	Jumlah Kehadiran	Jumlah Potongan (Rp.)
a	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan alasan yang sah.%		
b	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah.%		
c	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa alasan yang sah%		
d	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan, dan/atau kantor pada jam kerja tanpa alasan.%		
	JUMLAH			

4. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1	(Uraikan cuti yang dilaksanakan)	(dibayarkan sejumlah ...% selama Bulan) sejumlah Rp..... setiap bulannya.

5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

6.1.	Jumlah bruto	:	Rp.
6.2.	Penyesuaian atas capaian nilai SKP	:	Rp.
6.3.	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.4.	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
	Jumlah Netto		Rp.

Tanggal : 20...
PEJABAT YANG BERWENANG,

NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY